



Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture development)

Jaka sulaksana
Dina Dwirayani



**Pembangunan Pertanian
Berkelanjutan (*Sustainable
Agriculture development*)**

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture development*)

Jaka sulaksana
Dina Dwirayani



Pembangunan Pertanian Berkelanjutan ***(Sustainable Agriculture development)***

Penulis:
Jaka sulaksana
Dina Dwirayani

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Januari 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SEKAPUR SIRIH

Sebuah cita-cita dari penulis, ingin sekali menuliskan berbagai informasi, gagasan atau pemikiran terkait pembangunan pertanian sebagai wujud nyata kontribusi dalam pembangunan pertanian di masyarakat. Minimal berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pembangunan pertanian, baik konsep atau pun praktek nya.

Pertanian harus dipahami sebagai sebuah budaya, tidak semata-mata sebagai bisnis *an sih*. Jika pertanian hanya dipahami sebagai sebuah bisnis, maka tentunya para petani banyak sekali yang akan berhenti dari dulu karena tentu mereka sering atau pernah mengalami berbagai kerugian. Tetapi karena, bertani adalah profesi sekaligus budaya, maka mereka nikmati saja apa yang telah dialami. Jika untung, mereka bersyukur dan jika rugi mereka tawakal.

Buku ini sifatnya lebih kepada informatif tentang berbagai isu pertanian baik dahulu atau pun yang bersifat futuristik. Semoga saja, apa yang disajikan dalam buku ini menambah khazanah baru dalam dunia pertanian.

Majalengka, 09 Februari 2025

Penulis.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR PENTINGNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	1
BAB II PENGERTIAN DAN SEJARAH PERTANIAN INDONESIA	3
A. Pengertian Pertanian	3
B. Sejarah Pertanian	5
C. Pembangunan Pertanian Era Reformasi	14
D. Pembangunan Pertanian Era Nawa Cita	15
E. Kostrani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian)	16
F. Hortikultura Indonesia : Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	17
G. Perkebunan Andalan	17
H. Swasembada Protein Dan Devisa Ekspor	18
I. Tiga Serangkai Pertanian	18
BAB III PEMBANGUNAN PERTANIAN	18
A. Usaha Pokok Pembangunan Pertanian	29
B. Syarat-Syarat untuk pembangunan pertanian	30
C. Transformasi Ekonomi	31
D. Modernisasi Pertanian	32
E. Pertumbuhan Pertanian yang Pesat	33
F. Dampak Pertanian Terhadap Transformasi Ekonomi	34

G.	Dominasi Pertumbuhan Pertanian dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Cross-Section	35
H.	Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Gizi	37
I.	Pengentasan Kemiskinan dalam Keadaan yang Bertentangan dengan Pesatnya Pertumbuhan Pertanian	40
J.	Proporsi Kemiskinan yang Tinggi Dibandingkan dengan Kepadatan Kemiskinan yang Tinggi	45
K.	Perangkap Kemiskinan	46
L.	Ketahanan pangan	47
M.	Peningkatan Nutrisi	49
N.	Perubahan Iklim dan Kualitas Pola Makan	50
O.	Revolusi Hijau	52
P.	Penyuluhan Pertanian	59
BAB IV PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN		64
A.	<i>The Resource Exploitation Model</i>	65
B.	<i>The Conservation Model</i>	66
C.	<i>The Location Model</i>	67
D.	<i>The Diffusion Model</i>	68
E.	<i>The High-Pay Input Model</i>	68
F.	<i>The Induced Innovation Model</i>	69
G.	Pendekatan Agribisnis	69
BAB V PERTANIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		77
A.	Pertanian dan Lingkungan: Teori	77
B.	Masalah Keberlanjutan dan Lingkungan	82
C.	Degradasi Lahan, Cagar Alam, dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	82
D.	Penggunaan Input yang Berlebihan	85
E.	Perubahan Iklim	87

BAB VII PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 96

BAB VIII PERTANIAN PRESISI	105
A. Pengantar Pertanian Presisi	105
B. Ciri – Ciri Pertanian Presisi	107
C. Perlunya pertanian presisi	111
D. Penerima <i>Global Positioning System</i> (GPS)	112
E. Pemantauan dan Pemetaan Hasil	113
F. Penginderaan jauh	114
G. Sistem informasi geografis (GIS)	115
H. Manajemen informasi	115
I. Mengidentifikasi penyedia layanan pertanian presisi	115
 BAB IX KEBIJAKAN PERTANIAN	 118
A. Kebijakan Harga	118
B. Kebijakan Pemasaran	121
C. Kebijakan Struktural	123
D. Kebijakan Pertanian dan Industri	124
E. Pendapatan Penduduk Desa dan Kota	125
 DAFTAR PUSTAKA	 126

BAB I

PENGANTAR PENTINGNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pertanian merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Bahkan, pertanian sudah ada sejak zaman prasejarah meskipun bentuknya sangat sederhana. Pada saat itu, masyarakat Indonesia memiliki pola hidup yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan mereka berpindah – pindah tergantung pada alam. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat mulai memanfaatkan hutan dan mengalihfungsikannya menjadi ladang dan mulai menetap di suatu tempat. Hingga saat ini, sektor pertanian dengan segala dinamikanya masih menjadi pekerjaan utama mayoritas masyarakat Indonesia. Pertanian menjadi bagian dari pembangunan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan slope yang menurun dari taraf kemiskinan masyarakat Indonesia. Namun, masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar karena terjadi ketimpangan antara kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Pedesaan masih menjadi simbol kemiskinan di Indonesia. Padahal, pedesaan identik dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan sebagian besar masyarakatnya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Pembangunan pertanian perlu terus dilakukan dan dikembangkan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Kemiskinan tetap menjadi hal yang menakutkan bagi bangsa kita. Ketimpangan

pendapatan dan kecilnya insentif yang didapat dari pertanian tanaman pangan menjadikan generasi muda bangsa enggan terjun di dunia pertanian. Terlebih, pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan secara global karena terkait dengan ketahanan pangan dalam upaya mengentaskan kelaparan. Teknologi terkait pertanian saat ini semakin berkembang. Idealnya, pembangunan pertanian harus bisa lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan teknologi.

Namun, perlu diperhatikan pula terkait lingkungan dalam upaya pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian harus bisa memecahkan berbagai masalah dalam sistem agribisnis tetapi prinsip kelestarian lingkungan harus tetap terjaga. Bagaimanapun juga, perkembangan industri pertanian maupun non pertanian memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Model pembangunan pertanian yang tepat harus dipilih supaya tujuan dari pembangunan pertanian dapat tercapai. Pendekatan agribisnis menjadi salah satu implementasi dari model pembangunan yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia.

Pertanian presisi merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan pertanian saat ini. Pertanian presisi merupakan metode pertanian yang menggunakan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya yang tepat dan efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Akhirnya, pemikiran ini diakhiri dengan penyampaian penjelasan tentang berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang semestinya diambil oleh pemerintah. Harapannya kebijakan-kebijakan ini betul-betul mengutamakan kepentingan petani yang selama ini selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

BAB II

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERTANIAN INDONESIA

A. Pengertian Pertanian

Dalam artikel mereka, Harris dan Fuller menyatakan bahwa **"pertanian"** adalah **istilah** paling komprehensif untuk menggambarkan berbagai cara di mana budidaya tanaman dan domestikasi hewan mendukung populasi dunia dengan menyediakan makanan dan produk lainnya. Kata bahasa Inggris **"agriculture"** berasal dari **kata** Latin **"ager"** (ladang) dan **"colo"** (mengolah), yang jika digabungkan membentuk kata Latin **"agricultura"** (ladang atau pertanian yang dapat ditanami). Akan tetapi, berita sekarang meliputi berbagai macam kegiatan yang merupakan bagian integral dari pertanian dan mempunyai terminologi deskriptifnya sendiri, seperti budidaya, domestikasi, hortikultura, arborikultura dan hortikultura pasar, tetapi juga bentuk-bentuk peternakan seperti ternak tanaman campuran, pastoralisme dan transhumansi. **Pertanian sering dijelaskan dengan istilah-istilah** seperti **"awal"**, **"primitif"**, **"transformatif"**, **"ekstensif"**, dan **"intensif"**, tetapi makna pastinya tidak dapat ditentukan hanya dengan istilah-istilah ini saja. Selain itu, berbagai karakteristik digunakan untuk menentukan jenis pertanian tertentu, seperti jenis tanah, frekuensi penanaman, serta tanaman dan hewan utama. Istilah pertanian kadang kala terbatas pada penanaman tanaman, tetapi pemeliharaan ternak biasanya mencakup kedua kegiatan tersebut (Harris & Fuller, 2014).

Kamus Bahasa Inggris Oxford (1971) mendefinisikan pertanian secara luas sebagai **"Ilmu dan seni mengolah tanah, termasuk kegiatan-kegiatan terkait mengumpulkan hasil panen dan beternak hewan ternak, pengolahan tanah, peternakan, pertanian (dalam skala yang paling luas nalar)."** Dalam hal ini, kami juga menggunakan istilah tersebut dalam arti yang paling luas dan inklusif.

Awal mula produksi pangan mewakili perubahan strategis dalam perilaku manusia menuju ke arah yang lebih baik manipulasi lingkungan tanah dan melalui pengaruh terhadap komposisi tanaman populasi yang tumbuh di tanah tersebut, melalui pembibitan khusus dan pemeliharaan satu atau beberapa spesies. Meskipun budidaya mungkin melibatkan berbagai praktik, dan ini cenderung dipilih domestikasi morfologi, setidaknya pada tanaman benih, kita dapat mendefinisikan pertanian dalam kaitannya dengan skala budidaya, keunggulannya dalam lanskap lokal dan kontribusinya dalam komponen utama dari pola makan manusia. Dalam pengertian ini, pertanian adalah bentuk penggunaan lahan yang mewakili perubahan lanskap, karena masyarakat secara teratur membudidayakan, memelihara, dan lebih memusatkan perhatian pada tanaman domestik dan/atau binatang. Pertanian menciptakan ladang untuk produksi tanaman dan ternak dalam skala besar. Meskipun budidaya skala kecil mungkin melibatkan beberapa tanaman, pertanian melibatkan penciptaan ladang-ladang besar yang ditanami tanaman dalam skala sedemikian rupa sehingga, pada prinsipnya, dapat dikenali dalam kumpulan data *palaeovegetasi* regional, yang dapat diperoleh dari *palaeosol*, dan sebagian besar dari disimpulkan sumber sisa-sisa tanaman arkeologi. Bagaimana seseorang membedakan

pertanian dari pertanian skala kecil? skala budidaya bervariasi menurut parameter geografis dan konteks budaya tertentu.

B. Sejarah Pertanian

1. Zaman Pra Sejarah

Pertanian merupakan bagian dari peradaban masyarakat Indonesia. Pertanian sudah ada sejak dulu kala, sejak manusia ada di bumi. Pada zaman prasejarah, masyarakat belum mengenal tulisan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu serta mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat pada saat itu berpindah – pindah dan makan dari apa yang tersedia di alam. Alat – alat yang digunakan pun berupa batu. Bisa dibayangkan, kehidupan manusia pada saat itu sangat bergantung pada alam. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai berfikir bagaimana caranya bertahan hidup tanpa harus selalu bergantung kepada alam. Sehingga, mulailah muncul budidaya bercocok tanam.

Pada masa bercocok tanam, masyarakat mulai memanfaatkan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan dan mulai menetap di suatu tempat. Mereka mulai mengenal beberapa komoditas pertanian seperti pisang, durian, manggis dan padi. Padi belum menjadi komoditas utama. Sementara untuk sumber protein mereka dapatkan dari berburu. Diperkirakan masyarakat sudah mengenal sistem irigasi sederhana karena untuk menanam keladi yang dijadikan bahan pangan pada saat itu, perlu air yang banyak. Mereka membuat pematang – pematang yang dilengkapi dengan saluran air (Poesponegoro, Notosusanto dan 1984). Selain itu, sudah mulai dikenal perdagangan dengan sistem

barter dan alat – alat yang digunakan untuk pertanian tidak hanya batu melainkan logam.

2. Zaman Kerajaan Hindu Budha Dan Kerajaan Islam

a. Zaman Kerajaan Hindu Budha

Pada zaman sejarah, sudah ditemukan bukti – bukti tertulis maupun relief di beberapa daerah dan yang menggambarkan kegiatan pertanian yang merupakan kegiatan utama masyarakat Indonesia. Prasasti Yupa, merupakan berita yang dipahat diatas batu. Dalam prasasti tersebut ditemukan pujian – pujian untuk Raja Mulawarman yang sering memberikan sedekah bumi untuk rakyatnya. Pada masa ini juga masyarakat mulai mengenal sistem irigasi. Subak merupakan organisasi kemasyarakatan di Bali yang mengatur sistem pengairan sawah untuk bercocok tanam padi yang dilakukan secara bersamaan dan tanggung jawab bersama pula (Sinaga et al., 2024). Air dari saluran utama dibagi ke dalam puluhan saluran – saluran kecil yang masuk ke sawah – sawah. Pada masa ini, kegiatan menjadi sangat penting karena berlaku pajak hasil bumi atau pajak tanah. Sumber penghasilan kerajaan Hindu Budha adalah dari pertanian. Berbagai komoditas yang dibudidayakan yaitu padi, buah – buahan dan sayuran serta perkebunan ((Nida, 2014)). Padi merupakan komoditas utama dan menjadi tulang punggung perekonomian. Hal tersebut tergambar pada relief Candi Borobudur.

Pada masa Hindu Budha sudah ada pasar dan sistem tengkulak. Untuk transaksinya ada dua jenis yaitu barter dan penggunaan mata uang. Ada pasar, artinya ada jalur distribusi dan komoditas yang diperdagangkan bukan hanya dari satu desa tetapi dari berbagai desa dengan menggunakan distribusi darat dan sungai.

b. Zaman Kerajaan Islam

Uka Tjandrasasmita, seorang Sejarawan dalam buku *Arkeologi Islam Nusantara* (2009) menuliskan bahwa pada abad ke - 15 masehi, mulai muncul pengaruh Islam dan Kesultanan Islam di Nusantara. Awal abad ke - 15, Kerajaan Majapahit runtuh dan Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.

Tumbuhnya kerajaan Islam mengakibatkan tumbuhnya kegiatan ekspor dan impor hasil pertanian. Beberapa kerajaan berfungsi sebagai kota bandar. Kota bandar berfungsi sebagai tempat melakukan ekspor dan impor komoditas yang diperlukan oleh kerajaan. Kegiatan ekspor dan impor membutuhkan kota pusat kerajaan dan kota bandar dan sangat bergantung pada angin muson. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah perkampungan para pedagang asing di Jakarta diantaranya Kampung Pecinan, Kampung Keling, Pakojan dan kampung - kampung lainnya (Tjandrasasmita, 2000). Komoditas ekspor pada masa itu adalah lada, sutra, kapur barus, emas, kayu dan lain - lain. Sementara komoditas yang diimpor adalah berbagai jenis kain putih, belacu, dril dan katechu.

Pada abad ke - 16, jaringan perdagangan semakin ditingkatkan lagi secara regional dan internasional di bawah pimpinan pemerintahan Sultan Ageung Tirtayasa. Namun, pada akhir abad ke - 17 hingga ke -18 berhenti karena adanya larangan dari VOC yang kekuasaannya sudah ada di Banten sejak pemerintahan Sultan Haji. Akhirnya, awal abad ke - 19 menjadi awal kehancuran kesultanan dan menjadi kabupaten dibawah Hindia Belanda. Kegiatan perdagangan bergeser ke Batavia sebagai pusat VOC.

Dari beberapa kesultanan yang mengalami kehancuran, Kesultanan Aceh Darusalam paling bertahan

karena adanya persatuan antara pemimpin dan ulama. Selain perkembangan politik yang kuat, Kesultanan Aceh juga berhasil mengembangkan perdagangan. Perkembangan politik dan perdagangan menunjang kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak saat itu, para pedagang dari Belanda, Inggris dan Perancis datang ke Aceh untuk mengadakan perjanjian perdagangan. Pihak Belanda tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena tidak adanya kesepakatan.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai masa kejayaannya dibidang politik, militer, ekonomi dan keagamaan. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran dalam jaringan perdagangan. Sumber daya Aceh habis digunakan untuk peperangan dan jatuh ke tangan Hindia - Belanda. Akhirnya, kegiatan perdagangan menjadi monopoli Hindia - Belanda. Pengaruh Islam yang cukup kuat pada masa kerajaan Islam adalah adanya pajak dan zakat yang sesuai syariat Islam.

3. Zaman Kolonial

Datangnya Portugis dan Belanda ke Indonesia mulai menggeser peran kerajaan Islam dalam perdagangan komoditas pertanian di Indonesia. Selain untuk berdagang, bangsa Portugis memiliki tujuan lain yaitu berpolitik dengan semboyan "*gold, glory, gospel*" yang berarti perdagangan, penguasaan militer dan penginjilan. Sejak saat itu, jaringan kesultanan Indonesia mula terancam hingga lama kelamaan jatuh ke tangan kolonial. Sehingga, Indonesia tidak memiliki lagi jaringan perdagangan.

Belanda tidak hanya menguasai perdagangan rempah - rempah tetapi ingin juga menguasai perkebunan Indonesia. Namun, VOC mengalami kebangkrutan. Kemudian, pemerintahan Hindia - Belanda mengembangkan

cultuurstelsel yang merupakan perkebunan negara. *Cultuurstelsel* adalah kewajiban membayar pajak dan tenaga sukarela, rakyat bekerja tidak dibayar atau dikenal dengan kerja rodi. Pada masa itu, rakyat diwajibkan menanam 20% lahan pertaniannya dengan komoditas ekspor. Mereka juga wajib bekerja di perkebunan sebagai pajak atas 80% lahan yang tidak ditanami komoditas ekspor. Komoditas yang ditetapkan oleh kolonial diantaranya kopi, tebu, nila dan tembakau. Pada tahun 1817, Dr.CGL mendirikan Kebun Raya Bogor dan berfungsi sebagai lembaga kajian yang banyak membantu Pemerintah Hindia Belanda dalam teknis budidaya *Cultuurstelsel*.

Pada tahun 1860-an muncul gerakan kaum Liberal yang mempertanyakan mengenai kebenaran kemiskinan di daerah koloni Hindia Belanda. Tokoh Liberal mengatakan bahwa Belanda berhutang kepada pribumi dan sudah sepantasnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Akhirnya, pada tahun 1870 *cultuurstelsel* resmi dibubarkan. Kemudian, lahirlah *Agrarische Wet* (Undang – Undang Agraria) pada tahun 1870. Para investor boleh menyewa tanah milik pemerintah atau rakyat. Komoditas yang dibudidayakan yaitu kopi, tebu, tembakau, karet dan kelapa sawit. Selain itu, sektor pertambangan mulai muncul dan menggeser sektor pertanian.

Pada awal abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda melakukan modernisasi pertanian tetapi mengabaikan sistem pertanian tradisional rakyat Indonesia. Akibatnya, perkebunan mengalami perkembangan sementara komoditas padi mengalami involusi (Geertz). Kondisi tersebut dinamakan dualistik ekonomi yang menimbulkan perlawanan dari petani. Sepanjang abad 19, muncul beberapa pergerakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah

Kolonial Belanda seperti Gerakan Millenarisme, Ratu Adil, Nativisme, Revivalisme, Sektarianisme dan Mahdicme.

Tahun 1942 -1945 merupakan masa pemerintahan Jepang. Selama masa pemerintahan Jepang tidak banyak perubahan pada institusi, tetapi nama – nama disesuaikan ke dalam bahasa Jepang. Kebun Raya Bogor yang berperan sebagai lembaga kajian, mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Jepang dan kegiatan kajian tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga banyak peneliti yang menghabiskan waktu untuk menulis dan mengolah data hasil kajian mereka.

4. Pasca Kemerdekaan

Pada tahun 1947 pemerintah membuat perencanaan sektor ekonomi yang diberi nama Rencana Produksi Tiga Tahun RI yaitu tahun 1948, 1949 dan 1950. Rencana produksi ini disusun oleh J.Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan sehingga diberi nama Rencana Kasimo.

a. Era Orde Lama

Rencana Kasimo bertujuan untuk menanggulangi keadaan darurat karena pada saat itu masih terjadi perang. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menanam jagung dan ubi kayu. Selain itu, direncanakan pula pusat pendidikan masyarakat di tiap kecamatan yang diberi nama Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan sekarang diberi nama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Keamanan beberapa wilayah Indonesia yang tidak menentu karena dikuasai oleh Belanda, menyebabkan Rencana Kasimo termasuk pembentukan BPP tidak berjalan dengan lancar meskipun sudah terdapat petunjuk praktis untuk pelaksanaannya.

Pada tahun 1949 setelah penyerahan kedaulatan, Rencana Kasimo digabungkan dengan Rencana Wisaksono

menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI). RKI terdiri atas dua tahap yaitu tahun 1950-1955 dan tahap kedua tahun 1955-1959.

Pada tahun 1958, ada kegiatan intensifikasi padi seluas 1000 ha yang dikenal dengan Padi Sentra. Petani bisa memperoleh pinjaman berupa benih dan pupuk. Peningkatan produksi beras yang diharapkan berhasil melalui upaya intensifikasi, ternyata tidak membuahkan hasil.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang cakupannya lebih luas dari rencana – rencana sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, RPLT memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Selain itu, dipengaruhi pula oleh keadaan luar negeri yang tidak menguntungkan karena adanya resesi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada tahun 1957 dan 1958.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 sangat penting bagi Indonesia. Tujuan utama dari UUPA adalah untuk menciptakan dasar hukum agraria nasional yang stabil, menyederhanakan hukum pertanahan, dan menetapkan dasar hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Gebrakan Pembangunan Semesta Berencana yang dicanangkan oleh Depernas (1961-1969) nampaknya sebelum memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada. Pada periode tersebut, adanya perbaikan pada kegiatan penyuluhan pertanian. Sistem penyuluhan terus mengalami pembaharuan menjadi lebih aktif yang awalnya hanya berupa demonstrasi menjadi demonstrasi diikuti bimbingan. Maka dari itu, diberi nama Bimbingan massal (Bimas) dan merupakan cikal bakal lahirnya Proyek Bimas.

b. Era Orde Baru

Pada awal orde baru, kondisi ekonomi mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat program pembangunan yang dibagi ke dalam jangka lima tahunan selama lima periode yang disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

1). Repelita I (1969 – 1974)

Rencana Pembangunan Nasional Berencana 1969-1994 berpusat pada pembangunan pertanian. Maka, diadakan pengangkatan masal penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Bersamaan dengan itu, Departemen Pertanian membentuk Badan Pengendali Bimas yang bertugas mengelola dan mengendalikan Proyek Bimas. Petani peserta Bimas mendapatkan sarana produksi pertanian, program penyuluhan pertanian dan kredit sarana produksi dari BRI. Sarana produksi disediakan oleh penyalur sarana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Program Bimas adalah kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi dengan berbagai instansi. Melalui Program Bimas, diharapkan petani bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2). Repelita II (1974-1979)

Pada tahun 1974 Program Bimas melalui masa pemantapan dan dibentuklah Badan Kajian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Keppres tahun 1974 dan 1979 menetapkan bahwa Balitbangtan sebagai unit Eselon I dan membawahi 12 unit Eselon 2.

3). Repelita III (1979-1984)

Upaya perbaikan penyuluhan pertanian tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1979 terjadi perubahan pendekatan dari pendekatan perseorangan ke pendekatan secara kelompok dan diberi nama Intensifikasi khusus (Insus). Pendekatan secara kelompok ternyata berhasil dan

dikembangkan menjadi kerjasama antar kelompok dalam penyelenggaraan intensifikasi penerapan pola tanam yang serempak serta keseragaman varietas unggul seluas 1000 ha dalam satu hamparan dan dikenal dengan Supra Insus. Penerapan Insus dan Supra Insus terus mengalami perkembangan sehingga produksi padi dapat ditingkatkan secara terarah dan berencana dan berturut – turut terus meningkat sehingga mencapai swasembada.

4). Repelita IV (1984-1989)

Pada awal Repelita IV, Indonesia mencapai swasembada beras. Atas prestasi tersebut, FAO memberikan penghargaan dalam bentuk medali emas kepada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa memberikan bantuan 100.150 ton beras kepada penduduk Afrika yang mengalami kelaparan pada saat itu. Swasembada beras ternyata tidak bertahan lama karena tantangan dalam produksi padi semakin tinggi. Selain itu, cakupan program Bimas mengalami perluasan dari yang hanya padi menjadi tebu, ayam buras dan mina padi. Pada masa ini, penyuluhan mendapatkan perhatian khusus.

5). Repelita V (1989 – 1994)

Repelita V berfokus pada pembangunan pertanian yang lebih maju dan efisien sehingga swasembada pangan dan tujuan – tujuan pembangunan lainnya bisa tercapai. Selain swasembada pangan, upaya peningkatan produksi juga terjadi pada sektor perkebunan dan perikanan. Upaya peningkatan dilakukan dengan memadukan proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil – hasil perikanan.

6). Repelita VI (1994 – 1999)

Rencana Jangka Panjang Tahap II diawali dengan Repelita VI. Pembangunan pertanian berfokus pada industri

produk – produk olahan pertanian. Pendekatan pembangunan pertanian melalui agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak pembangunan. Agroindustri dan agribisnis berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperluas lapangan pekerjaan, stabilisasi harga, peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional.

C. Pembangunan Pertanian Era Reformasi

1. Gema Palagung

Gerakan Mandiri Padi Palawija dan Jagung (Gema Palagung) merupakan program yang dibentuk sebagai revitalisasi Program Bimas yang mulai mengendur. Melalui Gema Palagung, berusaha mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan cara memperkuat koordinasi antar instansi. Dalam perkembangannya, pembangunan pertanian berpihak pada impor dibandingkan upaya produksi dalam negeri. Meskipun mengalami berbagai tantangan, hasil – hasil pembangunan pada orde baru tidak hilang di antaranya sistem agribisnis yang terus berkembang.

2. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (2004-2013)

Rencana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Pada tahun 2005, pemerintah memulai program revitalisasi pembangunan. Sahkan Undang-undang Nomor 16 tentang Sistem Pertimbangan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan pada tahun 2006, yang diikuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 tentang Uraian Pelayanan Pertimbangan Pertanian pada tahun 2007, menjadikan program ini berhasil. Upaya untuk meningkatkan produksi beras yang didukung oleh perekrutan Penyuluh Pertanian Sementara (THL-TBPP) mencapai swasembada beras kedua

Indonesia pada tahun 2008. Badan Kajian dan Pengembangan Pertanian Jepang meluncurkan "Program Percontohan Sosialisasi Inovasi Teknologi Pertanian" pada tahun 2005 untuk mendorong adopsi teknologi. Pemerintah daerah dan petani menyambut program ini.

Tahun 2007 lahirlah UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. RPJPN merupakan perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun dan terbagi dalam beberapa tahap.

Pada tahun 2010, pertanian Indonesia diarahkan kepada pertanian organik dan rencana tersebut baru dicanangkan pada tahun 2013 dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 karena belum adanya kesiapan dari petani. Tahun 2045 merupakan 100 tahun pasca kemerdekaan RI dan diharapkan sudah terwujud pertanian berkelanjutan yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing kuat.

D. Pembangunan Pertanian Era Nawa Cita

Pembangunan pertanian periode 2015– 2019 menjalankan kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo yakni Nawa Cita. Program Nawa Cita maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 ini terdiri dari:

1. Revisi regulasi yang menghambat
2. Membangun infrastruktur dan investasi secara besar-besaran
3. Mengembangkan sistem produksi masif dan membangun lahan tidur
4. Menangani sistem distribusi

Untuk mendukung pembangunan pertanian, perlu adanya modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian merupakan syarat untuk terciptanya daya saing dan peningkatan kualitas hasil pertanian. Pemerintah telah memberikan fasilitas bantuan alsintan sebanyak 423.197 unit dalam empat tahun terakhir dan merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Pengembangan digitalisasi pertanian juga terus dilakukan mengingat pentingnya hal tersebut di era digital.

Beberapa program dalam pembangunan pertanian pada Periode Nawa Cita diantaranya:

- 1). Swasembada produksi komoditas pangan pertanian melalui upaya khusus(UPSUS)
- 2). Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa(Serasi)
- 3). Sapi Indukan Wajib Bunting(SIWAB)
- 4). Pemberdayaan rumah tangga miskin pertanian– RTMP
- 5). Bun500
- 6). Biofuel B100
- 7). Peningkatan kualitas bibit ternak sapi
- 8). Sapira

E. Kostrani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian)

Salah satu program 100 hari menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo periode 2019-2024 yaitu program komando strategis pembangunan pertanian di kecamatan (Kostratani). Untuk mendukung program tersebut, diadakan *agriculture war room* (AWR) di kantor pusat Kementerian Pertanian dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. AWR berfungsi memberikan data real time jika dibutuhkan oleh presiden.

F. Hortikultura Indonesia : Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Hortikultura adalah budidaya tanaman yang dilakukan di pekarangan atau kebun. Pada awalnya hortikultura hanya untuk kesenangan. Namun, seiring berkembangnya zaman, hortikultura berkembang menjadi lebih komersil. Komoditas hortikultura terdiri dari sayuran, buah – buahan, tanaman obat dan tanaman hias.

Setelah swasembada pangan tercapai, pemerintah mulai berfokus pada hortikultura. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998, hortikultura hadir sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata dan pasar modern di Indonesia yang membutuhkan komoditas buah dan sayuran. Untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik, hortikultura dikembangkan dengan bioteknologi dan menerapkan *smart agriculture* pada revolusi industri 4.0.

G. Perkebunan Andalan

Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 menjadi waktu yang tepat untuk mengambil alih kembali perkebunan besar dari Belanda. Perkebunan merupakan salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu perencanaan strategis agar mampu memberikan perubahan terkait ekonomi, kelembagaan maupun lingkungan. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan perkebunan di masa yang akan datang.

Tantangan berat pengembangan sektor perkebunan yaitu perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim adalah emisi karbon tinggi yang diakibatkan ulah manusia.

Tantangan lainnya yang tidak kalah berat adalah perkembangan teknologi, perang dagang dan perubahan demografi. Maka, tugas generasi muda untuk menjaga eksistensi komoditas perkebunan Indonesia agar tetap *world class*.

H. Swasembada Protein Dan Devisa Ekspor

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan pada era orde lama yaitu meningkatkan produksi pangan rakyat, termasuk pangan hewani, daging, telur dan susu. Saat ini, Indonesia sedang menuju swasembada protein hewani. Maka dari itu, perlunya penguatan peningkatan produksi dan produktivitas berbagai macam ternak.

I. Tiga Serangkai Pertanian

Penyuluhan pertanian yang sudah ada sejak zaman kolonial, terus dikembangkan untuk memajukan pertanian di Indonesia melalui Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan (Litbang) serta pendidikan dan pelatihan (Diklat). Kegiatan penyuluhan, Litbang dan Diklat merupakan Tiga Serangkai Pertanian.

BAB III

PEMBANGUNAN PERTANIAN

“ Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak mampu mempertahankan standar hidupnya atau mencurahkan energi mental dan fisik untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan, karena terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan” (Kusdiyanti, 2015).

Angka kemiskinan Indonesia bakal turun 0,33% pada tahun 2024 ketimbang tahun sebelumnya. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan juga menurun 680.000 dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, ketimpangan kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Ada perbedaan jumlah orang miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan. Angka kemiskinan di pedesaan 13,58 persen, sedangkan di perkotaan 11,64 persen. Kemiskinan tidak terbatas pada jumlah atau persentase orang yang hidup dalam kemiskinan. Ukuran lain yang perlu dipertimbangkan yakni jenjang keparahan serta dalamnya kemiskinan.

Level keparahan kemiskinan di pedesaan sebesar 0,483 sedangkan di perkotaan sebesar 0,252. Sementara, tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan sebesar 1,983 dan di perkotaan sebesar 1,095. Menurut tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan tahun 2024, kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan.

“Masalah kemiskinan yang berkaitan dengan pedesaan, memang sudah menjadi masalah sejak dulu dan belum sepenuhnya tuntas di saat ini. Bila memandang kembali, bersumber pada informasi dari Badan Pusat Statistik mencatat kalau pada September 2015 sebanyak 11,2% dari total penduduk Indonesia ataupun 28.532.570 jiwa ialah warga miskin. Dari jumlah tersebut, nyatanya sebagian

besar warga miskin merupakan warga pedesaan “ (Badan Pusat Statistik, 2023).

“ Tidak cuma itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbedaan antara warga perkotaan serta pedesaan IPM ialah indeks yang membandingkan standar hidup, harapan hidup, serta pembelajaran di seluruh negeri. Dengan menggunakan HDI sebagai indeks, negeri bisa dikategorikan selaku maju, berkembang, ataupun terbelakang. Tidak cuma itu, HDI digunakan buat mengukur bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi mutu hidup “ (Badan Statistik dan Pembangunan, BPS, 2015). Pendapatan, kesehatan, serta pembelajaran merupakan komponen yang diukur. Hasil pengukuran HDI tercantum dalam 4 jenis: peringkat 1 sampai 47 menampilkan" pembangunan manusia sangat besar", peringkat 48 sampai 94 menunjukkan" pembangunan manusia lagi", serta peringkat 142 sampai 187 menunjukkan" pembangunan manusia rendah".

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024, “ terjadi peningkatan indeks IPM yaitu 0,85% dari tahun sebelumnya. Selama periode 2020 – 2024, IPM rata – rata juga meningkat sebesar 0,75% tiap tahun. Namun, jika dilihat dari indeks IPM tiap provinsi, terlihat kesenjangan di beberapa daerah. Wilayah Indonesia Timur mendominasi IPM rendah dan Sementara DKI Jakarta memiliki indeks IPM paling tinggi ”.

Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. IPM merupakan alat ukur kualitas hidup masyarakat yang dijabarkan melalui tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, cenderung sulit mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang layak. Sebaliknya, program – program yang

dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan akan membantu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan fakta – fakta di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pedesaan menjadi “*icon*” kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah yang rumit. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah lain, seperti kelaparan, keterlantaran, marginalisasi, dan penyakit sosial lainnya. Ini adalah fenomena yang disebut “lingkaran kemiskinan”. Nurkse (1953) membuat gagasan bahwa “sebuah negara miskin itu miskin karena memang miskin”, atau bahwa “sebuah negara miskin itu miskin karena memang miskin” (Nurjihad & Dharmawan, 2016).

Nurkse juga menjelaskan bahwa “lingkaran setan kemiskinan, yang melibatkan masyarakat miskin di negara miskin. Kemampuan menabung dan investasi yang rendah disebabkan oleh rendahnya pendapatan, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas dan akhirnya menghasilkan tingkat pendapatan yang rendah. Ada dua jenis lingkaran setan kemiskinan: sisi penawaran modal dan sisi permintaan modal”.

Pada sisi penawaran modal, sekeliling kemiskinan diuraikan sebagai fenomena di mana rendahnya penghasilan disebabkan oleh rendahnya produktivitas, yang menuju pada keterampilan menabung penduduk yang terbatas. Perihal ini setelah itu berakibat pada rendahnya pembangunan modal (investasi), yang menyebabkan negeri mempunyai jumlah benda modal yang sedikit serta mengurangi tingkatan produktivitas. Sementara itu, dari sisi permintaan modal, negara-negara dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi, seperti negara berkembang, memiliki insentif yang rendah untuk berinvestasi karena terbatasnya pasar untuk berbagai